

KONVERGENSI SIMBOLIS DALAM KOMUNIKASI RUANG SIBER

THE SYMBOLIC CONVERGENCE OF CYBERSPACE COMMUNICATIONS

Moh.Wildan

Sekretariat Ditjen Aplikasi Informatika, Ditjen Aptika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
Gedung Utama, Lt 3, Jl. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat, 10110- Indonesia, Telp/ Fax: 021-3451363
e-mail: mowi001@kominfo.go.id

Naskah diterima tanggal 27 Agustus 2014, direvisi tanggal 23 Oktober 2014, disetujui tanggal 12 November 2014

Abstract

The Ministry of ICT (Kominfo) implemented intranet policy for internal organization communications. Every member of the organization or Civitas have a single login access to the portal that serves as a gateway for e-Government applications and public spaces . This study discusses the implementation of public disclosure is implemented through cyber space communications. The Symbolic Convergence Theory that developed by Ernest Bormann used to determine how the construction process of consciousness is formed. The study using qualitative methods with interpretive constructivist perspective. Research conducted during the 3 months of January to March 2014. To obtain validity data are gathered through three ways : observation , Focus Group Discussion (FGD) and in-depth interviews of seven informants who have been determined. The results of the study showed a process of dramatization messages that form fantasy chain. Fantasy Type of community and organizations that made up the rhetorical vision : information transparency. Fantasy theme found in the awareness of the process of bureaucratic reform. An efforts makes the Ministry of ICT as leading sector in communications and information technology sector with fantasy theme: Kominfo Gitu Loh!

Keywords: *Cyber Space Communications, Symbolic Convergence, Fantasy Themes*

Abstrak

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menerapkan kebijakan intranet untuk komunikasi internal organisasi. Setiap anggota organisasi atau civitas Kominfo mempunyai *single login access* ke Portal Kominfo yang berfungsi sebagai *gateway* berbagai aplikasi *e-Government* dan ruang publik. Penelitian ini membahas implementasi keterbukaan informasi publik yang diterapkan melalui komunikasi ruang siber. Teori Konvergensi Simbolik yang dikembangkan oleh Ernest Bormann digunakan untuk mengetahui bagaimana proses konstruksi kesadaran bersama. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan perspektif konstruktivis interpretif dan dilakukan selama tiga bulan dari Januari s.d Maret 2014. Untuk memperoleh validitas, data digali melalui tiga cara yakni observasi, *Focus Group Discussion* (FGD) dan wawancara mendalam terhadap tujuh informan yang telah ditentukan. Hasil dari penelitian menunjukkan terjadi proses dramatisasi pesan yang membentuk rantai fantasi. Jenis fantasi sivitas dan organisasi yang membentuk visi retorikal: transparansi informasi. Tema fantasi yang ditemukan antara lain kesadaran terhadap proses reformasi birokrasi dan upaya-upaya menjadikan Kementerian Kominfo sebagai *leading* di sektor komunikasi dan teknologi informasi dalam fantasi: *Kominfo gitu loh!*

Kata kunci: Komunikasi Ruang Siber, Konvergensi Simbolis, Tema Fantasi

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan (informasi) dan ide/ gagasan dengan media apapun tanpa ada batasan-batasan. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang yang penting bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Apabila ditarik lebih jauh maka kumpulan informasi membentuk pengetahuan dan individu atau bangsa yang menguasai ilmu pengetahuan akan mempunyai kekuasaan dan keunggulan atas bangsa-bangsa yang lainnya. Filosofi *'Information is knowledge and knowledge is power'* ini telah ditancapkan oleh Francis Bacon di awal abad ke-15.

Di akhir abad ke-19 dunia memasuki abad internet maka informasi melalui teknologi komunikasi jaringan semakin menunjukkan peran sebagai penentu kekuatan suatu bangsa. Informasi juga merupakan bagian penting dalam menilai ketahanan nasional suatu bangsa. Kebocoran informasi penting dapat mengganggu stabilitas antarnegara dan memunculkan ketegangan politik. Misalnya ketika terjadi penyadapan oleh Australia terhadap telepon presiden dan sejumlah pejabat Indonesia di akhir tahun 2013 yang memicu kebijakan diplomatis pemulangan Dubes Indonesia untuk Australia. (www.voaindonesia.com 18/2013).

Perkembangan teknologi semakin membuka pintu-pintu informasi dan pengetahuan. Internet telah menciptakan dunia baru yang disebut dunia maya atau *cyberspace* yang merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang menawarkan realitas baru berbentuk *virtual* (secara tidak langsung dan tidak nyata). Ruang

siber ini pada kenyataannya berhubungan sangat erat dan memengaruhi dunia nyata yang sebenarnya (*real space*). Hal yang pasti bahwa pertumbuhan dan perkembangan ruang siber ini semakin hari semakin meluas dan mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Penggunaan komputer dan teknologi internet sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang terdapat di dunia nyata dapat memengaruhi dunia maya demikian pula sebaliknya. Misalnya kewajiban memiliki *e-KTP* sebagai identitas WNI, *e-banking* dalam transaksi perbankan, Sistem *e-voting* dalam pemilihan calon kepala daerah dan anggota dewan, *Cyber Notary* yang mencatat dan meregistrasi kenotariatan secara *online*, *e-health* untuk monitoring mandiri kesehatan individu, *e-Money* yang lebih dikenal sebagai *bitcoin* dalam permainan *mass multiplayer online rapid games* (MMPORG) dan *e-Government* yang mengacu pada penggunaan teknologi informatika dan komunikasi (TIK) untuk penyelenggaraan pemerintahan atau sistem layanan publik agar lebih efektif dan efisien.

Sistem penyelenggaraan pemerintahan dikenal dengan istilah yang disebut birokrasi. Tipe organisasi birokrasi mempunyai dua ciri utama yakni mendasarkan pada peraturan (yurisdiksi) yang telah ditentukan dan bekerja dengan mekanisme hierarki sebagai perwujudan dari tingkatan otoritas dan kekuasaannya. Di dalam yurisdiksi tersebut seseorang mempunyai tugas dan tanggung jawab resmi (*official duties*) yang memperjelas batas-batas kewenangannya dalam pekerjaannya. Dan proses komunikasi yang terjadi didasarkan pada dokumen tertulis (*the files*). Kedua hal tersebut menyebabkan birokrasi pemerintah sering dipersepsikan sebagai tertutup (Thoha, 2011).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menghadirkan nuansa baru di Republik Indonesia. Undang-undang ini merupakan penegasan, bahwa hak atas informasi setiap warga negara dijamin oleh

negara. Artinya, pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik dapat dijalankan dengan lebih optimal. Keterbukaan informasi menuntut terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Yakni sistem pemerintahan yang akuntabel, transparan dan mengundang partisipasi masyarakat dalam setiap proses perumusan kebijakan publik.

Gema UU KIP memberikan vibrasi positif di masyarakat yang menganut keterbukaan informasi di era globalisasi. Keterbukaan informasi ditandai dengan semakin marak penggunaan *gadget* berteknologi internet untuk mencari, memperoleh dan menyampaikan informasi. Keterbukaan informasi mendorong tercipta birokrasi pemerintah yang bersih, bebas KKN dan berwibawa. Hampir bersamaan dengan UU KIP tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Kominfo) juga membidani kelahiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE sebagai regulasi yang pertama kali mengatur individu atau badan publik berinteraksi menggunakan media komunikasi digital di dunia maya. Tata kelola pemerintahan yang baik harus diwujudkan dengan membangun *website* dan portal yang semakin memperluas aktivitas komunikasi di ruang siber.

Saat ini penggunaan komputer dan teknologi internet sudah merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan perkantoran sehari-hari. Pelaksanaan pekerjaan perkantoran dan layanan publik prima hanya dapat terwujud dengan sistem yang mendukung. Pembangunan portal merupakan salah satu upaya mendukung reformasi birokrasi yakni dengan menyediakan akses yang sama untuk seluruh anggota organisasi atau civitas di lingkungan Kementerian Kominfo. Portal sebagai sarana informasi, komunikasi serta koordinasi antarunit satuan kerja dan antarindividu anggotanya dengan lancar dan aman. Penggunaan kata civitas

ini nampaknya sengaja oleh para pembuat kebijakan agar menyetarakan akses antara anggota organisasi pada portal Kementerian Kominfo. Berdasarkan statistik maka anggota atau civitas Kominfo berjumlah kurang lebih tujuh ribu orang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Portal merupakan salah satu media komunikasi internal dalam sebuah organisasi yang menggunakan teknologi intranet. Intranet merupakan sarana bertukar informasi dalam sebuah grup organisasi dalam lingkup tertutup. Jaringan intranet sekaligus sebagai sarana peningkatan kinerja melalui *work flow collaboration* agar efisiensi kerja dapat menjadi seoptimal mungkin (Wulandari, 2004). Meskipun intranet disebut sebagai jaringan tertutup komunikasi organisasi namun berdasarkan teknologi yang digunakan mempunyai sifat-sifat 'publik' yakni:

1. *Realtime*, informasi dapat diakses kapan saja dan saat itu juga oleh civitas anggota organisasi.
2. *Massif*, penyebaran informasi ke seluruh anggota organisasi yang dalam hal ini pegawai Kementerian Kominfo di seluruh Indonesia.
3. *Mobile*, portal Kementerian Kominfo didesain juga untuk akses dari *gadget* kecil dan *smartphone*.
4. *Recorded*, semua informasi dan data yang telah di input atau *upload* dapat terlacak dan cenderung bersifat permanen meskipun pada tampilan telah diedit atau dihapus.

Portal intranet Kementerian Kominfo didesain sebagai *single gateway* yakni metode pembelokan akses internet dengan cara login terlebih dahulu menuju portal intranet. *Single gateway* bertujuan menciptakan mobilisasi, ketika portal intranet Kominfo digunakan sebagai wadah untuk berbagi ilmu dan forum diskusi. Webportal Kominfo yang pertamakali dikembangkan di akhir tahun 2012 telah mengalami beberapa kali modifikasi. Fungsi

sistem informasi di dalam Portal secara garis besar terbagi menjadi dua yakni aplikasi intranet dan kanal dan diskusi internal.

Ketika terjadi pertukaran informasi, komunikasi, dan diskusi di dalam portal Kominfo maka tema besarnya Reformasi Birokrasi. Komunikasi dan diskusi tersebut merupakan sarana komunikasi internal yang lintas jabatan yang diharapkan mampu mendorong keterbukaan informasi, menciptakan iklim partisipatif dan pada tahap selanjutnya mengakselerasi Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi sendiri merupakan sebuah proses visioner, pencapaian tahap ideal, sebagaimana dikutip dari buku saku panduan Reformasi Birokrasi bahwa tujuan utama Reformasi Birokrasi, “Untuk Menciptakan Birokrasi Kelas Dunia”.

Untuk menjelaskan proses komunikasi dalam ruang siber ini akan digunakan teori Konvergensi Simbolik. Teori konvergensi simbolik merupakan sebuah teori umum di mana sebuah kelompok (*group*) mengonstruksi makna bersama dan membangun identitas tentang kelompok dan bukan kelompoknya dalam sebuah kesadaran bersama yang disebut fantasi. Ernest Bormann dari *University of Minnesota* menciptakan sebuah teori komunikasi untuk mempelajari tipe komunikasi pada kelompok-kelompok kecil di mana terjadi pertukaran makna bersama (*sharing meaning*) antaranggotanya yang menciptakan konvergensi simbolik. Borman meyakini dengan adanya pertukaran makna bersama tersebut akan terbentuk fantasi bersama (*sharing fantasies*) sehingga sekelompok orang dapat bertransformasi menjadi sebuah grup yang mempunyai ikatan kohesivitas kuat. Pada perkembangan selanjutnya *Symbolic Covergence Theory* (SCT) ini menjadi semakin luas penggunaannya sehingga konvergensi simbolik dapat digunakan untuk membedah konstruksi makna dalam tataran interpersonal, kelompok, organisasi, dan bahkan media massa. (Borman dalam *Communication Yearbook*, Vol. 25. 2001).

Penelitian tema fantasi berakar pada pendekatan interpretif dan objektif untuk menjelaskan fenomena komunikasi. Fantasi tidak berkaitan dengan aspek persuasi yang irasional dan nonrasional namun lebih kepada proses rasional pembentukan makna bersama atau visi retorik kelompok atau organisasi tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa makna bersama tersebut merupakan gabungan makna bersama para anggotanya. Margaret Duffi (2008) dalam penelitian tentang “*Online Hate Group*” membuktikan bahwa Teori Konvergensi Simbolik (*Symbolic Convergence Theory*) menawarkan kerangka yang sangat berguna untuk meneliti fantasi organisasi-organisasi kebencian/ perlawanan yang berkomunikasi menggunakan jaringan internet. Di mana medium internet memberikan peluang menghadirkan pesan *persuasive global* dan mencakup lebih banyak *audience*. Sementara hasil penelitian Leena Saarinen (2010) memberikan kesimpulan bahwa sesuatu yang terjadi di komunitas virtual mempunyai dampak yang erat dengan kejadian di dunia nyata.

Analisis Tema fantasi yang berakar dari teori konvergensi simbolik ini akan menjadi pisau bedah untuk melihat komunikasi dalam membangun relasi dan pengertian bersama melalui konvergensi simbolik komunikasi ruang siber. Proses ini disebut pembentukan konvergensi simbolik, dimana individu-individu atau civitas Kominfo membangun sebuah kesadaran kelompok atau organisasi melalui medium portal Kominfo. Karena tema fantasi bukan suatu rekaan komunikasi atau angan-angan, melainkan tema yang berkembang di antara civitas Kominfo.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat tiga hal yang menjadi fokus permasalahan, yaitu: *pertama*, Reformasi Birokrasi diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (*good governance*), pemerintahan yang bersih (*clean*

government), dan bebas KKN (korupsi kolusi dan nepotisme). Perkembangan teknologi menyebabkan arus komunikasi menjadi datar dan setara sehingga menghilangkan batas-batas struktur sosial dan jabatan kepegangatan di lingkungan kerja.

Kedua, Organisasi Kominfo yang merupakan struktur formil dan birokratis namun hendak membuka diri dengan membangun sarana komunikasi yang lebih transparan dan terbuka. Melalui media portal ruang siber Kementerian Kominfo memberikan ruang komunikasi dan diskusi sebagai sarana komunikasi lintas jabatan yang diharapkan mampu mendorong keterbukaan informasi dan menciptakan iklim partisipatif di lingkungan organisasi Kominfo. Penelitian akan dilakukan dengan melihat keterkaitan antar tema-tema yang muncul dalam diskusi forum tersebut.

Ketiga, Konsep konvergensi simbolis terjadi ketika civitas Kominfo berkomunikasi di ruang siber menggunakan media portal yang merupakan intranet. Pada tahap selanjutnya penggunaan peran komunikasi internal dalam organisasi ini merupakan upaya strategis dalam membentuk persepsi yang sama tentang suatu ide, keterbukaan informasi, dan transparansi kebijakan sehingga berperan penting dalam perolehan dukungan dan komitmen dari seluruh karyawan untuk mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan penelitian yaitu, 1) Menjelaskan tentang keterbukaan informasi dan transparansi kebijakan dalam komunikasi ruang siber yang terdapat di portal Kominfo, dan 2) Menjelaskan tentang pembentukan persepsi yang sama tentang suatu ide, sebagai tema fantasi yang bersifat positif atau negatif terhadap Reformasi Birokrasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan praktis antara lain; mendeskripsikan hubungan antara keterbukaan informasi dalam komunikasi di ruang siber dengan iklim organisasi; menggambarkan proses konvergensi simbolis

dalam komunikasi ruang siber; dan memberi masukan pada pembuat/ perumus kebijakan tentang tema fantasi yang potensial untuk diimplementasikan dalam rangka mendukung Reformasi Birokrasi. Memberi wawasan kepada individu PNS pada umumnya agar lebih mengoptimalkan komunikasi di ruang siber.

Dalam penelitian ini landasan konseptual yang digunakan adalah teori Konvergensi Simbolik. Teori konvergensi simbolik dipelopori oleh Ernest Bormann (1989), teori ini menjelaskan tentang proses pertukaran pesan yang menimbulkan kesadaran kelompok yang menghasilkan hadirnya makna, motif, dan juga persamaan bersama. Kesadaran kelompok yang terbangun dalam suatu kelompok dapat membangun semacam makna, motif untuk bertindak bagi orang-orang dalam kelompok tersebut. Teori konvergensi simbolik merupakan teori yang unik karena mencoba mengemukakan pentingnya faktor narasi atau penceritaan dalam komunikasi. Bahwa apa yang sering dibicarakan dan dianggap penting dalam sebuah konteks kelompok itu akhirnya akan mereproduksi makna simbolik dan akhirnya akan menentukan makna atau realitas seseorang. Sehingga apa yang sering didiskusikan dan dikomunikasikan dalam webportal Kementerian Kominfo kemudian akan menjadi sebuah makna umum, realitas yang disadari dan mempunyai peluang yang lebih besar untuk dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan publik yang mendukung Reformasi Birokrasi.

Teori konvergensi simbolik merupakan teori dalam tradisi sosiokultural yang mengkaji bahasa, fantasi, dan simbol fakta dalam proses komunikasi. Sehingga diharapkan dapat menjelaskan makna bersama yang muncul dalam relasi komunikasi di webportal Kominfo terutama yang terkait dengan proses Reformasi Birokrasi. Kartikawangi (2013) menyatakan kemampuan teori konvergensi simbolik dengan beragam contoh penelitian yang mengkaji dampak pembentukan fantasi dalam pengembangan identitas dan budaya

kelompok. Dalam situasi yang problematik maka visi yang dimiliki oleh masing-masing individu berdampak pada cara seseorang mendefinisikan hubungan yang ideal dan kemudian menentukan cara individu itu bertindak dalam suatu hubungan (Cragan Shield, 1999 seperti dikutip dari Kartikawangi).

Kata simbolis (*symbolic*) digunakan karena teori ini berurusan dengan bahasa, fantasi dan banyak simbol fakta (sebagai lawan dari material dan sosial). Kata konvergensi (*convergence*) digunakan karena dasar teorema dari teori ini menjelaskan proses dinamika komunikasi fantasi kelompok yang dibagikan untuk dipahami bersama sebagai sebab dari kesatuan dunia simbolis peserta komunikasi. Dalam tradisi komunikasi, teori konvergensi simbolik menyediakan penjelasan teoretis tentang efek berfantasi (*fantasizing*). Efek fantasi tersebut menghasilkan tiga hal yakni penciptaan kesadaran (*consciousness-creating*), pengembangan kesadaran (*consciousness-raising*), dan kesinambungan kesadaran (*consciousness-sustaining*). Sehingga dapat disimpulkan analisis tema fantasi (*fantasy theme*) membantu anggota kelompok menciptakan kesatuan kelompok (*group cohesiveness*).

Lebih jelasnya teori Konvergensi Simbolik ini terdiri dari tiga bagian. Bagian yang pertama menyangkut penemuan dan perencanaan dari bentuk-bentuk komunikasi yang berulang dalam suatu kelompok. Pola komunikasi yang dikembangkan dan diikuti oleh para anggota mengindikasikan adanya kesadaran bersama dari kelompok tersebut. Bagian yang kedua dari teori ini adalah menggambarkan dan menjelaskan kemampuan yang dinamis dari fantasi-fantasi terkait dengan bagaimana realitas simbolik bersama dikembangkan, dirawat, dan atau justru merosot. Bagian yang ketiga menjelaskan mengapa anggota kelompok saling berbagi fantasi. Dari berbagai studi tentang relasi umumnya, saling berbagi fantasi menjadi cara anggota-anggota kelompok untuk mengekspresikan kesamaan,

tapi sebelum hal itu, terutama sekali kegiatan tersebut terkait dengan aturan dalam kelompok dan hubungan antaranggota (Bormann, 1985, 1996).

Fantasi merupakan suatu interpretasi imajinatif dari peristiwa pada masa lalu, suatu kegiatan membayangkan peristiwa di masa depan, atau suatu penggambaran peristiwa sekarang yang dihapus dalam ruang dan waktu dari peristiwa aktual. Bormann berpendapat bahwa rantai fantasi dalam interaksi kelompok secepatnya menghasilkan dalam konvergensi simbolik, yang memungkinkan anggota-anggotanya untuk secara kolektif menyetujui sebuah keputusan. Singkatnya, sebuah keputusan kelompok merupakan hasil dari visi retorik bersama dari anggota-anggotanya. Namun, meski begitu, teori ini tetap mengandaikan bahwa keyakinan, sikap, nilai, dan persepsi yang dipegang oleh anggota-anggotanya menuntun pada keputusan yang dipilih oleh kelompok tersebut.

Pengenalan pada suatu fantasi, menurut Bormann, menawarkan kesempatan pada anggota lain dalam kelompok untuk bergabung dalam bangunan dari fantasi tersebut, sebuah proses yang telah disebutkan sebagai rantai fantasi. Rantai fantasi memungkinkan anggota-anggota kelompok untuk secara bersama mengalami emosi yang sama, mengembangkan pahlawan dan musuh bersama, merayakan tindakan-tindakan tertentu sebagai hal yang terpuji, dan menginterpretasikan beberapa aspek dari pengalaman mereka bersama dengan cara yang sama. Jadi, mereka menjadi sebuah konvergensi simbolik karena kesamaan pengalaman mereka. Rantai fantasi dalam interaksi kelompok secepatnya menghasilkan dalam konvergensi simbolik, yang memungkinkan anggota-anggotanya untuk secara kolektif menyetujui sebuah keputusan kolektif.

...jointly experience the same emotions, develop common heroes and villains, celebrate certain action as laudable, and interpret some aspect of their common

experience in the same way. Thus, they come to symbolic convergence about that part of their common experience. (Bormann, 1986)

Dengan rantai fantasi memungkinkan untuk menghubungkan kelompok-kelompok dengan komunitas yang lebih besar. sebagai titik awal untuk penciptaan dan penyebaran dari visi retorik yang dapat mengembangkan pergerakan-pergerakan sosial dan menyatukan masyarakat atau komunitas tersebut. Berkait dengan komunikasi civitas Kominfo tentang reformasi birokrasi di ruang siber maka emosi dan membagi ide yang mendorong kepada peningkatan kinerja serta keterbukaan informasi merupakan upaya pengembangan sisi positif (sisi pahlawan) organisasi Kementerian Kominfo. Sementara sisi negatif merupakan ide-ide dan gagasan yang cenderung tertutup, lamban dan *redtape* birokratis. Penelitian yang dilakukan oleh Eyo (1985) mengaitkan tipe-tipe fantasi pada tujuan tim atau organisasi yang menemukan bahwa fantasi-fantasi prestasi lebih baik diadaptasi pada tujuan dengan melibatkan produktivitas dan kualitas ketimbang fantasi-fantasi penguasaan.

Diyakini terdapat keberagaman penelitian menggunakan teori konvergensi simbolik ini. Salah satunya pengukuran kecenderungan berfantasi. Dengan skala yang ditentukan untuk mengukur kemampuan individu menciptakan fantasi tinggi (*high fantasizer*) dan pencipta fantasi rendah (*low fantasizer*). Skala kecenderungan berfantasi ini akan memungkinkan peneliti menguji dampak dari fantasi personal pada individu. Berdasarkan taksonomi tentatif dalam teori teori konvergensi simbolik yang dibuat oleh Bormann, Cragan dan Shields seperti dikutip dalam Kartikawangi (2013) terdapat sembilan pengelompokan. Berkait dengan penelitian ini maka akan digunakan kelompok taksonomi kualitas tema fantasi retorikal yang terdiri dari: pragmatis (*pragmatic*), semestinya (*righteous*), dan sosial (*social*). Pemilihan ini berdasarkan sifat kinerja birokrasi yang selalu mendasarkan pada peraturan hukum yang

dianggap sebagai yang semestinya namun seringkali kaku. Kemudian kecenderungan individu yang cenderung bersifat pragmatis dan sosial.

Griffin (2003) dalam buku “*A First Look At Communication Theory*” menyatakan bahwa teori konvergensi simbolik sebuah teori yang dapat dipercaya (*credible*) karena memenuhi dua tujuan ilmiah ilmu pengetahuan. Yakni mampu dibuktikan secara objektif dan interpretif. Teori konvergensi simbolik merupakan teori yang menjelaskan kondisi masa lalu, masa kini dan memprediksi masa depan. Dalam tabel perbandingan ilmiah memenuhi lima kriteria sebagai berikut :

Tabel 1. Penerimaan Teori secara Objektif dan Interpretif

<i>Scientific Theory</i>	<i>Interpretive Theory</i>
<i>Explanation of the data</i>	<i>Understanding of people</i>
<i>Prediction of future</i>	<i>Clarification of values</i>
<i>Relative simplicity</i>	<i>Aesthetic Appeal</i>
<i>Testable Hypotheses</i>	<i>Community of agreement</i>
<i>Practical Utility</i>	<i>Reform of society</i>

(Sumber: Griffin, 2003)

Pada perkembangan selanjutnya, Lee Hopkins (2011) mendeskripsikan (*Symbolic Convergence Theory* (SCT) menjadi tiga konsep yakni:

1. *Basic concept* yang terdiri dari empat aspek yakni *Fantasy Theme, Symbloc Cue, Fantasy Type* dan *Saga*.
2. *Critical Evaluation Concept* yang terdiri dari tiga tahapan yakni *Shared Group Consciousness, Rhetorical Vision Reality Link*, dan *Fantasy Theme Artistry*.
3. *Dramatic Structural Concept* yang merupakan penjelasan dari *Rhetorical Vision*. Di mana *Rhetorical Vision* tersebut terdiri dari 5 elemen yakni

Dramatic personae, Plot Line, Scene, Sanctional agent, dan Master analogue.

Teori konvergensi simbolik memfokuskan pada efek kohesivitas yang terbentuk dari rantai tema fantasi yang berasal dari data-data mentah. Tidak hanya menjelaskan hasil namun juga prosesnya. Teori juga dianggap mampu memprediksi masa depan melalui penciptaan visi retorik yang berisi motivasi. Fantasi individu juga akan mengundang respon dan memicu (*trigger*) rantai fantasi. Melalui simbolik konvergensi terbentuk Fantasi yang merupakan penyederhanaan (*simplicity*) ide-ide yang bertaburan dalam komunitas organisasi. Bormann sendiri telah membuat metode sehingga proses-proses dari teori ini dapat diuji kembali oleh orang luar. Dan terakhir visi retorikal dari simbolik konvergensi mempunyai tiga analogi praktis sebagai yang semestinya, yang bersifat sosial dan yang bersifat pragmatis.

Penjelasan pembuktian interpretif karena adanya usaha menangkap pemahaman individu dalam memaknai iklim komunikasi organisasi. Mengapa individu melakukan sebuah tindakan maka di samping pemahaman atas iklim juga terdapat nilai-nilai tertentu yang mendasarinya. Teori simbolik konvergensi sendiri menganalisis tema fantasi dari organisasi secara bebas nilai (*ethically neutral*). Dengan menangkap nilai estetika organisasi, pemahaman bersama yang membangkitkan kesadaran untuk berubah atau melakukan tindakan tertentu.

Sementara Kartikawangi (2013) menegaskan bahwa tema Fantasi memiliki signifikansi dalam beberapa hal, yakni:

1. Memberi penekanan pada fungsi bahasa imajinatif dalam membangun kesadaran kolektif dan kebersamaan kelompok
2. Audiens kembali menjadi pusat kajian komunikasi
3. Analisis tema fantasi merupakan pendekatan sosial untuk mengkaji komunikasi dalam konteks kolektivitas
4. Analisis tema fantasi memungkinkan suatu analisis yang lebih kompleks atas

bahasa imajinatif baik fiksi maupun nonfiksi.

Jean Baudrillard (1972) mengemukakan bahwa budaya terbentuk dari proses komunikasi, di mana semua bentuk komunikasi merupakan produksi dan konsumsi tanda (*sign*). Pada tahap selanjutnya Baudrillard mengemukakan gagasan simulasi suatu efek di mana masyarakat semakin berkurang tingkat kesadaran mereka terhadap apa yang ‘*real*’ karena imaji yang disajikan oleh media. Bahwa setiap individu pada akhirnya akan termediasi. *Ecstasy of communication* terjadi karena kebutuhan, ketergantungan, dan kecanduan untuk terus ‘hidup’ di dalam layar komputer dan atau bahkan menjadi bagian daripadanya. Menjalani hidup dalam kungkungan ‘*hyperreality*’ yang menempatkan individu antara yang nyata dan virtual, realitas dan ilusi. Berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah menginvasi seluruh aspek kehidupan manusia. Maka hiperrealitas dalam pemikiran Baudrillard telah menciptakan transparansi dan menyerap subjek ke dalamnya.

Internet dan teknologi informasi telah membuat sesuatu yang virtual menjadi real beserta dengan sejumlah konsekuensi yang dihasilkannya. Secara etimologis kata *virtual* berasal dari kata *virtus* yang berarti kekuasaan atau kekuatan. Rheingold (1998) meyakini bahwa sesuatu yang virtual adalah perpanjangan dari realitas. “Layar menjadi semacam realitas, perpanjangan dari pikiran saya”. Perpanjangan ini adalah sebuah ilusi dengan menggambarkan sebuah sistem realitas virtual sebagai sebuah penenggelaman “dalam sebuah dunia buatan”. Kemudian Rheingold menambahkan definisi *virtual communities*, sebagai jaringan komunikasi interaktif yang terorganisir untuk sebuah tujuan tertentu atau sebagai sarana berbagi kepentingan bersama.

Manuel Castells (2010) juga mengemukakan konsep *Computer Mediated Communication* (CMC) yang membentuk masyarakat jaringan global. Bahwa

komputer sebagai medium komunikasi yang menghubungkan antar titik (*node*) membentuk sebuah jaringan (*network*). Jaringan tersebut merupakan struktur terbuka dan mampu terus berkembang tanpa ada batasan (bersifat global). Dalam proses pembentukan tersebut maka masyarakat jaringan (*network society*) membentuk struktur sosialnya sendiri. Pendapat senada dikemukakan oleh Barry Wellman (1996) bahwa komunitas maya bukan lawan yang berseberangan dengan komunitas nyata (*physical communities*). Komunitas maya merupakan komunitas yang mempunyai bentuk tersendiri, peraturan spesifik tertentu, terus hidup dan berkembang secara dinamis. Geoffrey Liu dalam jurnal *Computer-Mediated Communication* (<http://www.ascusc.org/jcmc>), menetapkan beberapa syarat terjadinya komunitas atau kelompok sosial maya, yaitu: (1) adanya ruang publik maya, (2) adanya aktivitas komunikasi dari para komunikator, (3) adanya anggota dengan jumlah besar sehingga memungkinkan terjadinya beberapa interaksi, (4) adanya kestabilan jumlah anggota dan konsistensi pemunculan anggota dan (5) adanya interaktivitas pesan verbal, pesan simulasi aksi dan konsistensi penggunaan *nickname*.

Meskipun masyarakat jaringan adalah masyarakat global, namun tidak berarti bahwa setiap orang termasuk di dalamnya. Tetapi setiap orang akan terpengaruh oleh proses yang terjadi dalam jaringan global yang membentuk struktur sosial. Dengan demikian, sikap eksklusif terhadap jaringan ini akan berpotensi terpinggirkan dari masyarakat jaringan. Dalam dunia jaringan, kemampuan untuk menguasai pihak lain bergantung pada dua mekanisme dasar berikut:

1. kemampuan untuk membangun jaringan, dan menentukan sasaran-sasaran dalam program jaringan
2. kemampuan untuk menghubungkan dan bekerjasama dengan berbagai jaringan lain melalui upaya berbagi sasaran bersama dan memperkuat diri

dari kompetisi dengan jaringan lain dengan cara membentuk kerjasama yang strategis.

Portal intranet Kementerian Kominfo didesain sebagai *single gateway* sehingga ketika civitas Kominfo mengakses intranet mereka memasuki ruang siber (*cyberspace*). Interaksi dengan teknologi internet pada dasarnya menyediakan apa yang disebut sebagai “*new public space*” (Jones, 1997). Jaringan internet yang dalam hal ini intranet mempunyai fungsi untuk melakukan ‘diskusi publik’ di ruang siber yang disebut *virtual sphere* karena digunakan untuk diskusi merespon realitas yang terjadi di dalam lingkup organisasi Kementerian Kominfo.

Terdapat empat kritik utama terhadap konsep ruang siber. Pertama, Castell (2010) mengemukakan konsep CMC (*Computer Mediated Communication*), bahwa komputer hanya merupakan medium komunikasi. Pendapat ini hanya mengakui adanya komunikasi antartitik (*node*) di dalam struktur organisasi dan mengabaikan adanya ruang maya. Meskipun demikian Castell menyatakan bahwa siapapun yang melakukan koneksi maka secara otomatis ia sudah menjadi bagian dari atau anggota masyarakat jejaring (*network society*). Kritik kedua diajukan oleh Fraser (2007) berkait legitimasi dan efektivitas dari opini ‘publik’. (*the legitimacy critique and the efficacy of public opinion*). Di dalam konteks organisasi Kominfo maka legitimasi dari opini anggota di dalam *webportal* dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan melalui akun yang bersangkutan. Meskipun terdapat kasus pencurian identitas yang merupakan permasalahan yang akan dibahas dari segi etika. Adapun efektivitas akan digali lebih dalam dari penelitian ini. Kritik ketiga berkait dengan isi/ konten diskusi, Benkler (2006) menemukan bahwa diskusi di virtual sphere rentan terhadap persoalan/ informasi yang tidak perlu yang diistilahkan “*Babel Objection*”. Terlalu banyaknya informasi yang berlalu-lalang di ruang virtual sehingga

membuka kemungkinan-kemungkinan informasi yang diunggah itu hanya sekadar rumor, palsu, atau *hoax* pada dasarnya akan membawa pada debat yang terfragmentasi dan tidak menutup kemungkinan ide-ide yang terbentuk akan lenyap begitu saja. Kritik terakhir terhadap ruang virtual juga bisa muncul dari apa yang dikatakan sebagai kesenjangan digital (*digital divide*) atau pembatasan keterlibatan pengguna terhadap sebuah komunitas diskusi publik.

Konsep teoretis ruang siber akan digunakan sebagai kerangka berpikir (model) di antara pilihan yang layak untuk komunikasi digital di dalam internal organisasi dan model untuk perubahan didalam *virtual sphere*. Pada kenyataannya saat ini ruang siber merupakan bagian dari realitas yang menjadi semakin besar dan dengan demikian seharusnya tidak mengejutkan jika memiliki implikasi dan aplikasi yang melampaui komunikasi komputer (CMC) sebagai sarana meningkatkan kualitas informasi dan keterbukaan kunci-kunci komunikasi dari struktur birokrasi.

Komunikasi internal yang lancar sangat diperlukan untuk kolaborasi kinerja efektif. Goldhaber (1993) mengangkat istilah komunikasi organisasi publik (*public organizational communication*) sebagai usaha suatu organisasi menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan. Komunikasi organisasi publik suatu organisasi didefinisikan sebagai proses pertukaran informasi yang dinamis antara organisasi dan publik eksternal dan internal. Publik eksternal dapat berupa konsumen, *supplier*, distributor, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan bila dikaitkan dengan publik internal contohnya seperti staf, manajer, dan pemegang saham (Goldhaber, 1993).

Oleh karena itu maka webportal kominfo sebagai ruang siber (*virtual sphere*) karena memenuhi tiga kondisi yakni:

1. Diciptakan sebuah kondisi hubungan yang jauh dari prasangka perbedaan status/ kepangkatan dan ada tendensi

untuk mengutamakan kesamaan yang ada pada mereka.

2. Diskusi dan pembahasan mengenai persoalan-persoalan internal organisasi dan Reformasi Birokrasi yang kemudian demikian tuntas, sampai tidak ada lagi pertanyaan berkaitan dengan persoalan tersebut.
3. Terjadinya sebuah proses kerjasama yang mampu mengubah kegiatan dan isu di lingkungan kerja menjadi komoditas budaya yang mengandung prinsip-prinsip inklusif untuk mendorong Reformasi Birokrasi.

Dari perdebatan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa istilah ruang maya (*virtual space*) atau ruang siber (*cyber space*) dan komunikasi jaringan (*network communication*) dapat dipertukarkan berdasarkan beberapa alasan. Pertama era konvergensi sekarang tidak dapat memisahkan komputer dan sistem jaringan sehingga sebuah komputer lebih merupakan medium dalam berkomunikasi. Prinsip komunikasi jaringan menggunakan medium komputer atau *gadget* yang mampu menangkap sinyal internet baik melalui jaringan kabel LAN, fiber optik, ataupun *hotspot (wi-fi)* dan awan internet (*cloud computing*).

Secara terminologis kata ruang siber diciptakan oleh penulis fiksi ilmiah William Gibson pada tahun 1984 dalam novelnya *Neuromancer*. Ruang itu menurut pendapat Gibson mengacu pada keberadaan dunia virtual yang dibuat oleh teknologi komunikasi atau internet ([www. weblog.anneahira.com](http://www.weblog.anneahira.com)). Diskursus kemudian muncul dengan adanya kesamaan dan keterhubungan yang saling mempengaruhi antara ruang siber dan ruang nyata (riil). Ruang atau dunia siber ada dimanamana dan tidak ada yang mati dalam jaringan bahkan ketika tubuh seseorang mati maka dapat dirancang sistem yang terus berlangsung sampai waktu yang ditentukan.

Menurut Budi Hartanto (2013) ruang siber merupakan sebuah ruang medium, bukan sesuatu yang terpisah dari dunia nyata. Dalam

konsepnya tubuh manusia memahami secara perseptif tentang kompleksitas dunia inderawi yang ditangkapnya melalui mediasi teknologi informasi. Sehingga dunia siber bersambung atau berhubungan kepada dunia nyata (*real world*). menggambarkan sebagai ruangan atau tempat komunikasi simbolik konvergensi berlangsung. Namun meski demikian peneliti tetap berfokus pada tema utama (*Grand Theme*) penelitian ini yakni menjawab pertanyaan penelitian. Bagaimana proses pembentukan fantasi civitas Kominfo yang selanjutnya membentuk konvergensi simbolis tentang reformasi birokrasi terjadi dalam komunikasi ruang siber. Termasuk meneliti bagaimana proses pembentukan tema Fantasi dalam konvergensi simbolis tersebut.

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap *social meaningful action*, melalui pengamatan langsung dan rinci terhadap pelaku sosial dalam *setting* keseharian yang alamiah. Dunia realitas kehidupan dan makna-makna situasi spesifik yang menjadi objek umum penelitian dipandang sebagai konstruksi para pelaku sosial. Artinya, para aktor tertentu, ditempat tertentu, pada waktu tertentu, menyuguhkan makna berbagai peristiwa dan fenomena melalui proses interaksi sosial yang panjang dan kompleks yang melibatkan sejarah, bahasa, dan tindakan.

Konstruktivisme sosial yang biasa dikombinasikan dengan interpretivisme (Mertens, 1998) adalah sebuah cara pandang lain. Dengan cara pandang ini, individu-individu mencoba untuk memahami dunia di mana mereka tinggal dan bekerja. Mereka mengembangkan pemaknaan secara subjektif atas pengalaman mereka—pemaknaan yang mengarah pada objek atau hal-hal tertentu. Kaum konstruktivis atau interpretivis meyakini bahwa untuk memahami dunia makna ini orang harus menginterpretasikannya. Peneliti harus menjelaskan proses-proses pembentukan makna dan menerangkan ihwal serta bagaimana makna-makna tersebut terkandung dalam

bahasa dan tindakan aktor sosial. Sarana-sarana atau proses-proses yang mengantarkan peneliti kepada interpretasi tindakan manusia sekaligus sebagai akhir atau tujuan proses tersebut yang disebut *verstehen* (pemahaman).

Meskipun demikian menurut Smith (1989) dalam Denzin dan Lincoln (2009) metodetidak dapatmenghilangkan subjektivitas peneliti, hanya dapat mengurangi. Creswell (2009) menambahkan bahwa para peneliti harus memosisikan diri mereka sedemikian rupa seraya mengakui dengan rendah hati bahwa interpretasi mereka tidak pernah lepas dari pengalaman pribadi, kultural, dan historis mereka sendiri. Mengingat peneliti juga adalah anggota civitas Kominfo maka akan berusaha semaksimal mungkin mengambil jarak demi menghasilkan gambaran yang se-objektif mungkin namun tetap reflektif. Peneliti hendak merefleksikan suatu realitas sosial sesuai dengan penghayatan subjek-subjek yang terkait dalam realitas itu sendiri. Pasalnya, penelitian yang berangkat dari paradigma konstruktivis menekankan empati dan interaksi dialektis antara peneliti-responden untuk merekonstruksi realitas yang diteliti, melalui metode kualitatif seperti *participant observation*. Mengingat realitas yang jika dipandang dari sisi ontologis merupakan konstruksi sosial. Kebenaran suatu realitas bersifat relatif, berlaku sesuai dengan konteks spesifik yang dinilai relevan oleh pelaku sosial. Dari sisi epistemologis, dalam paradigma konstruktivis, pemahaman suatu realitas atau temuan suatu penelitian merupakan produk interaksi peneliti dengan yang diteliti. Oleh karena itu, nilai, etika, dan pilihan moral merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam paradigma konstruktivis ini.

Dalam buku *The Social Construction of Reality*-nya Berger dan Luckman (1967) dan *Naturalistic Inquiry*-nya Lincoln dan Guba (1985). Konstruktivisme sosial ini sebenarnya meneguhkan asumsi bahwa individu-individu selalu berusaha memahami dunia di mana mereka hidup dan bekerja. Mereka mengembangkan makna-makna subjektif atas pengalaman-pengalaman mereka.

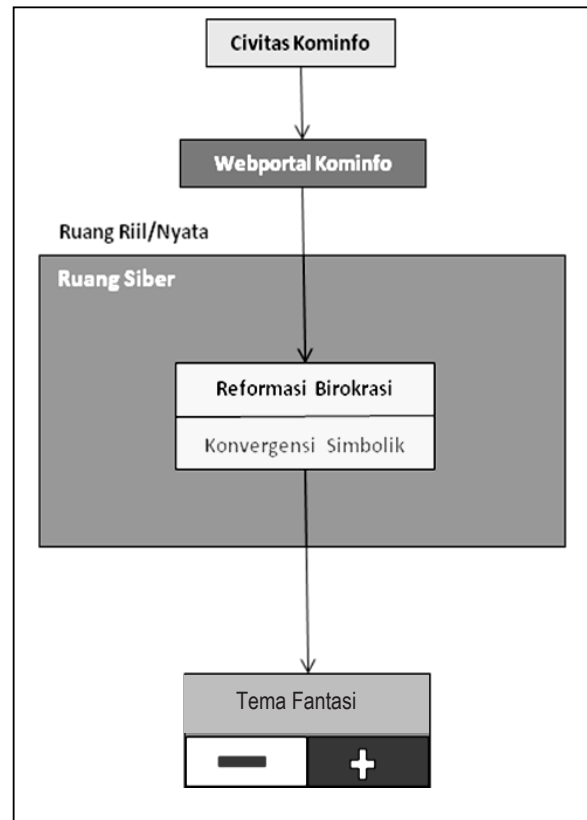
Konstruktivisme ini bersifat interpretif untuk dapat mengetahui pemahaman civitas Kominfo terhadap lingkungan di mana mereka tinggal dan bekerja.

Teori konvergensi simbolik digunakan untuk menemukan tema fantasi organisasi. Analisis tema fantasi dari teori konvergensi simbolik untuk menjelaskan isu-isu potensial yang bersifat positif dan negatif di ruang siber. Unit analisis penelitian yakni tema fantasi yang terbagi menjadi dua individu anggota organisasi/ civitas Kominfo dan organisasi kementerian Kominfo. Mengapa orang melakukan strategi konvergensi maupun divergensi dalam interaksi dengan orang lain? Terkait pertanyaan ini bisa dijelaskan beberapa motif konvergensi. Salah satunya adalah untuk memperoleh kesepakatan satu dengan yang lain. (Kartikawangi, 2013). Motif mencapai konvergensi merupakan hal yang sangat penting untuk memperoleh reaksi positif maupun negatif. Konvergensi mutual dapat terjadi apabila komunikasi oleh komunikan (civitas Kominfo) memiliki kesamaan dan mengarah kepada penyatuan ide. Sebaliknya divergensi terjadi apabila komunikasi yang terjadi di antara komunikan memiliki perbedaan arah dan mengarah kepada perpecahan, perbedaan pendapat, bahkan konflik. Baik konvergensi maupun divergensi dapat terjadi sebagian (*partial convergence*) atau seluruhnya (*complete convergence*).

Dari penjabaran tersebut maka dirumuskan model penelitian ini seperti terlihat pada Gambar 1.

Teknik pengumpulan data pertama dilakukan dengan analisis diskusi di portal Kominfo untuk menjangar tema-tema fantasi yang bersifat positif dan negatif. Temuan tema-tema fantasi tersebut digunakan sebagai dasar wawancara/ *interview* dan melaksanakan *Focus Group Discussions (FGD)*. Karena Penelitian tema fantasi sebenarnya lebih pas jika menggunakan metode wawancara mendalam (*in-depth interview*). *Interview* akan dilakukan secara semi struktur, menggunakan

pedoman wawancara namun bersifat bebas. Hasil temuan dalam observasi awal akan digunakan sebagai standar acuan awal.



Gambar 1. Model Penelitian

Analisis Tema Fantasi yang digunakan dalam FGD yang berfokus pada tema keterbukaan informasi yang mendukung reformasi birokrasi. Karena terkait komunikasi internal organisasi maka didefinisikan isu-isu yang potensial antara lain :

1. *employee privacy and voice* (kerahasiaan kepegawaian)
2. *free speech* (kebebasan bicara)
3. *honesty* (kejujuran)
4. *deception* (penipuan atau tertutupan)
5. *persuasion and coercion* (pembujukan dan pemaksaan)
6. *diversity* (keberagaman)
7. *whistleblowing* (penyeru keadilan)
8. *change* (perubahan)

9. *management style* (gaya kepemimpinan).
10. *leadership* (kepemimpinan).
11. *power, authority and control* (pembagian kekuasaan, wewenang dan pengawasan).

Partisipan dalam FGD dipilih berdasarkan yang mempunyai dua kesamaan pokok, yakni generasi Kominfo dan mengalami masa transisi sebelum dan sesudah Portal Kominfo dibangun. Generasi Kominfo terbentuk yang diketahui dari NIP (nomor induk pegawai) setelah tahun 2007 merupakan generasi awal penerimaan CPNS semenjak peleburan tiga lembaga yakni Depkominfo, Lembaga Informasi Nasional (LIN) dan Ditjen Postel.

Interviu akan dilakukan kepada 7 (tujuh) responden yang dianggap merupakan *key person* di organisasi Kominfo. Narasumber atau informan yang ditentukan berkait dengan posisi kunci dalam implementasi penggunaan portal sebagai forum diskusi yang mendukung keterbukaan informasi dalam rangka reformasi birokrasi. Responden kunci tersebut antara lain Sekretaris Jenderal, Kepala PDSI, Direktur *e-Government*, Sekretaris Ditjen SDPPI selaku eks. Ditjen Postel dan Pengurus Korpri yang diwakili anggota Koperasi Kementerian Kominfo ditambah dengan 2 orang staf untuk konfirmasi informasi dari pejabat tersebut. Gabungan ketiga teknik pengumpulan data tersebut yakni observasi, FGD dan wawancara mendalam akan dapat memenuhi validitas penelitian secara triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada dasarnya internet merupakan kebutuhan dasar bagi civitas Kominfo baik untuk mendukung pekerjaan ataupun mejalin komunikasi dan relasi dengan pihak-pihak lain. Kementerian Kominfo melalui portal Kominfo membuat mekanismenya kebijakan *single login* akses. Ketika seseorang akan mengakses internet maka ia harus login dan masuk melalui portal Kominfo terlebih dahulu. Melalui portal

Kominfo iklim komunikasi organisasi menjadi lebih *flat* (lebih datar). Interaksi menjadi lebih intens sekaligus mengurangi sekat-sekat struktural. Salah satu tujuan lainnya supaya komunikasi di lingkungan organisasi Kominfo menjadi lebih terbuka dan informasi menjadi semakin transparan.

Studi literatur menemukan tiga faktor yang mendasari pembuatan Portal Kominfo. Pertama, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pusat Data dan Sarana Informatika (PDSI) untuk memberikan pelayanan internet dan penyelenggaraan *e-government* di lingkungan Kominfo. Motivasi awal pembuatan portal berawal ketika ada restrukturisasi/ reorganisasi dari pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kominfo. Reorganisasi tersebut ternyata tidak otomatis merubah *e-office* atau sistem dalam persuratan elektronik. Padahal *e-office* sudah mulai digunakan sebagai sarana komunikasi disposisi dari atasan ke bawahan. Sehingga *e-office* pada akhirnya tidak bisa dipergunakan lagi. Kedua, bahwa selama ini Kominfo memang menerapkan *filtering* akses internet. Agar pegawai tidak mengakses situs porno dan membatasi penggunaan sosial media dan hiburan diwaktu jam kerja. Misalnya membatasi akses ke *Youtube* dan *Facebook* agar dapat dibuka pada jam tertentu saja. Ketiga, Kementerian Kominfo merasa perlu menciptakan komunitas maya di lingkungan civitas Kominfo. Sehingga pada akhirnya ini tujuannya adalah untuk meningkatkan interaksi di antara civitas. Melalui forum akan terjadi banyak interaksi di ruang siber sehingga muncul protes-protes, info, usul dan sebagainya. Apabila sudah ada kumpulan komunitas di dunia maya tersebut, maka akan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi kebijakan, regulasi dan peraturan di lingkungan internal Kominfo.

Hasil observasi terhadap kelompok diskusi (*thread*) yang muncul di forum diskusi portal Kominfo selama 3 bulan dari bulan Januari s.d Maret tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Observasi Kanal Diskusi

No.	Kanal	Jumlah kelompok diskusi
1.	Administrasi	11
2.	Fungsional	3
3.	Berita	7
4.	Jaringan	13
5.	Rohani	3
6.	Diskusi bebas	49
7.	Presensi elektronik	9
8.	Pengadaan barang dan Jasa	0

Pengelompokan diskusi tersebut tidak menggambarkan jumlah yang sebenarnya dari tema/ topik yang muncul dalam forum. Terdapat beberapa judul kelompok diskusi yang mirip dan sebenarnya dapat dijadikan satu. Peneliti menyimpulkan terdapat empat kendala yakni:

1. Tidak terdapat fitur pencarian (*searching*) judul diskusi.
2. Civitas yang merasa berkepentingan membuka forum baru dengan judul yang baru.
3. Membuka judul atau topik permasalahan baru memang bersifat subjektif dan relatif lebih mudah.
4. Tampilan muka (*interface*) portal Kominfo secara otomatis didesain menampilkan pesan dan judul-judul terbaru, sementara judul diskusi yang lama akan otomatis terlipat (tersembunyi) dan hanya terbuka jika di klik lebih lanjut.

Berdasarkan hasil observasi dan interviu kanal diskusi bebas merupakan yang paling sering diakses dibandingkan kanal-kanal lainnya. Diskusi bebas ditafsirkan oleh civitas Kominfo selaras dengan keterbukaan informasi tanpa ada pembatasan.

“Judulnya sudah diskusi bebas, berarti harus konsisten bebas, kalau kita kasih diskusi terbatas atau dikelompokkan berarti namanya diskusi terbatas”.

Ruang siber menistakan keterbatasan komunikasi antara pejabat dan staf. Antara si Badu yang staf dengan Bapak Sekretaris Jenderal yang pejabat eselon satu seolah tidak ada jarak, Artinya Portal Kominfo menjadi media komunikasi untuk pegawai, media interaksi untuk pegawai, media penyalur aspirasi untuk pegawai, civitas Kominfo.

Dengan penggunaan teknologi intranet maka komunikasi mengubah kebiasaan yang ada sebelumnya. Perubahan tersebut selanjutnya mengubah iklim komunikasi organisasi. Karena informasi dapat disampaikan dari satu orang ke sekaligus banyak orang. Kedua, penggunaan teknologi intranet juga memfasilitasi komunikasi dua arah, interaksional yang dapat melalui *email*, *chatting* dan dalam forum diskusi yang bersifat publik. Sehingga civitas Kominfo diharapkan dapat memikirkan efek/ dampak komunikasi. Setelah memikirkan dampak maka civitas Kominfo diharapkan dapat meningkatkan kedewasaannya.

Penggunaan teknologi intranet juga merubah kebiasaan mendasar dalam berkomunikasi. Sebelumnya kebiasaan komunikasi langsung dengan tatap muka dianggap merupakan komunikasi efektif.

Tipe organisasi lama apabila terdapat ketidakpuasan terhadap kebijakan pimpinan maka aspirasi cenderung diungkapkan dengan demo, surat keluhan ke kotak saran, surat kaleng atau tanpa identitas, dan *grundelan*. Semenjak penerapan teknologi intranet maka civitas Kominfo lebih mudah menyalurkan aspirasinya. Partisipan dalam FGD menyatakan bahwa:

“Kalau dulu yang saya tahu kebiasaan di Deppen itu kan demo, ketika ada ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau pimpinan biasanya staf-staf itu akan demo, dan itu beberapa kali terjadi, tapi kan sekarang sudah ngga perlu lagi, cukup dari situ sudah semua orang tahu”.

Unsur-unsur dasar yang membentuk iklim komunikasi suatu organisasi dapat diringkaskan menjadi lima kategori (unsur) pertama adalah anggota organisasi. Anggota

organisasi merupakan orang-orang yang melaksanakan pekerjaan organisasi. Sementara civitas Kominfo ditinjau dari sejarahnya merupakan penggabungan dari tiga lembaga yang mempunyai kultur budaya masing-masing. Generasi Kominfo dimulai ketika penerimaan pegawai atau tes Calon Penerimaan Pegawai Negeri Sipil (CPNS) angkatan pertama dengan penerimaan tahun 2007 (TMT 2007). Karena tidak setiap tahun membuka penerimaan CPNS maka sampai dengan tahun 2014 baru terdapat 7 generasi baru. Pembinaan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti pendidikan dan latihan PraJabatan (Diklat Prajab) pada awal masuk, kemudian dilanjutkan dengan diklat-diklat teknis dan struktural lainnya. Kebijakan menanamkan nilai-nilai komunikasi dan informatika sebagai pondasi budaya organisasi baru mulai dilaksanakan tahun 2012 dengan mewajibkan seluruh civitas secara bertahap mengikuti Diklat Dasar-Dasar Komunikasi (Daskom).

Kategori kedua pembentuk iklim komunikasi yakni pekerjaan dalam organisasi. Pekerjaan yang dilakukan anggota organisasi terdiri dari tugas-tugas formal dan informal. Pembagian menjadi tujuh satuan kerja (satker) eselon satu bertujuan agar pekerjaan dapat lebih spesifik. Dan agar lebih spesifik lagi maka dituangkan dalam rencana kerja yang kemudian dijabarkan dalam sebuah TOR (*term of reference*). TOR dibuat dalam rangka menjelaskan tujuan dari pelaksanaan suatu program kegiatan termasuk tahapan dan anggaran yang diperlukan. Setiap TOR memuat keluaran (*output*) yang merupakan hasil langsung dari program. Contoh output misalnya jumlah UKM yang bertransformasi menjadi e-UKM atau indeks pemeringkatan *e-Government* Indonesia. Beberapa keluaran secara mandiri atau bersama-sama harus membentuk dampak (*outcome*) yang merupakan efek lanjutan berupa perubahan yang diharapkan terjadi di masyarakat, misalnya meningkatnya pendapatan ekonomi. Kementerian Kominfo menerapkan anggaran

berbasis kinerja. Bahwa setiap program dan kegiatan dirancang mempunyai *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur. Anggaran berbasis kinerja juga sering disebut sebagai SMART (*spesifik, measurable, achievable, reasonable, dan timely*). Pekerjaan informil misalnya dalam mencari pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas pribadi, misalnya pengetahuan komunikasi dan informatika baik melalui pendidikan, diklat, ataupun mencatat pengalaman keseharian (*daily journal*). Dalam pelaksanaan pekerjaan maka pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai standar kompetensi untuk mengevaluasi kemampuan melaksanakan pekerjaan tersebut. Interaksi dalam pelaksanaan pekerjaan mempengaruhi perubahan komunikasi organisasi. Dengan fasilitasi aplikasi-aplikasi dalam portal dan forum diskusi di ruang siber maka memengaruhi perubahan iklim organisasi.

Unsur ketiga pembentuk iklim komunikasi berkait praktik-praktik pengelolaan organisasi (manajerial). Tujuan primer pegawai manajerial adalah menyelesaikan pekerjaan melalui usaha orang lainnya. Dalam hubungan manajerial terdapat komunikasi ke atas, ke bawah, dan ke samping. Pola-pola yang terbentuk dirasakan anggota organisasi sebagai iklim komunikasi. Hasil observasi dalam komunikasi di ruang siber menemukan telah terjadi perubahan pola komunikasi menjadi lebih datar, setara, dan menghilangkan sekat-sekat struktural birokrasi. Portal Kominfo memfasilitasi adanya keterbukaan informasi. Hal terpenting dengan adanya diskusi forum di ruang siber merubah cara berpikir, cara menyampaikan usulan dan aspirasi, megubah cara sosialisasi kebijakan dari yang semula konvensional dikumpulkan dalam rapat atau upacara di lapangan. Sehingga pada akhirnya terjadi reformasi sistem manajerial. Informan ke-1 menyatakan bahwa:

“Dengan adanya forum itu, cara berpikir yang selama ini..hierarki dan seterusnya itu bisa kita potong. Itu kan me-reform cara berpikir, me-reform usulan, me-reform... (cara kerja). Ndak perlu

misalkan kita kumpulkan rapat dan seterusnya, ya kan gitu. Terus pikiran-pikiran dari teman-teman bisa ditampung di situ, bisa dibaca di situ. Dan Saya yakin karena di Kominfo itu semua pasti buka itu, kan gitu”.

Unsur keempat yakni struktur organisasi yang merujuk pada hubungan-hubungan antara tugas-tugas yang dilaksanakan oleh anggota-anggota organisasi. Secara manajerial atau pengelolaan diskusi yang selama ini hanya diketahui dan dilaksanakan oleh PDSI (Pusat Data dan Sarana Informatika) selaku unit kerja yang mempunyai tugas (tugas dan fungsi) bertanggung jawab mengelola. Belum ditunjuk petugas yang secara langsung bertanggung jawab untuk lalulintas diskusi. Struktur forum diskusi di dalam Portal Kominfo yang tidak terdapat adanya moderator yang mengatur lalulintas diskusi. Sehingga banyak tema-tema diskusi yang saling berkaitan namun tidak jelas penyelesaiannya. Partisipan dalam FGD menyatakan moderator bisa saja diadakan dalam sebuah forum;

“Adanya moderator bisa menjembatani, “oh ini perlu..pejabat *nih*” dia yang memberitahu kepada pejabat, “Pak ada isu begini” begitu, mungkin via email, begitu, atau ada..ada lainnya, seperti itu saja sih”.

Unsur terakhir pembentuk iklim komunikasi adalah pedoman organisasi. Pedoman organisasi adalah pernyataan yang mempengaruhi, mengendalikan, dan memberi arahan bagi anggota organisasi dalam mengambil keputusan dan tindakan. Pedoman utama dalam organisasi birokrasi yakni peraturan-peraturan tertulis. Kedua yakni arahan dan kebijakan pimpinan dan ketiga adalah diskresi atau kewenangan pejabat tersebut. Diskresi merupakan kewenangan yang masih dapat ditolerir dalam koridor peraturan, tugas dan fungsinya. Hasil observasi yang diperkuat dengan interviu menemukan bahwa selama ini belum terdapat aturan khusus organisasi yang mengatur komunikasi di ruang

siber. Civitas Kominfo dipercaya mengetahui adanya Undang-undang No.28 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai pedoman berinteraksi di ruang siber. Ditambah dengan kode etik pegawai untuk mengatur perilaku keseharian. Regulasi dan perturan yang ada tersebut (UU ITE, PP PSTE dan kode etik kepegawaian) dianggap cukup untuk mengatur interaksi dan diskusi di Portal Kominfo. Informan ke-3 percaya bahwa civitas Kominfo dapat bertanggung jawab dan mengetahui peraturan yang ada sehingga tidak perlu dibuat aturan khusus tentang etika komunikasi di ruang siber tersebut.

“tapi menurut saya *sih* belum terlalu perlu ya, orang kita kan sudah mengetahui, ya walaupun ada satu dua, itu *kan* dengan kesadaran masing-masing menilai, kecuali kalau sudah 90%-80%, etika pegawai kita kurang atau keterlaluhan baru....(akan kita susun)”.

Maka dengan fasilitasi forum diskusi di Portal intranet terdapat perubahan dalam iklim komunikasi yang selama ini berlangsung antara lain:

1. Dengan adanya Portal terasa banyak kasus-kasus yang sebelumnya tertutup, hanya lingkungan atau grup tertentu saja yang mengetahui menjadi semakin luas penyebarannya.
2. Kotak saran dan sejenisnya menjadi kurang efektif dibanding portal.
3. Isu-isu menjadi lebih cepat ditindaklanjuti ketika masuk dalam forum portal.
4. Para pimpinan selaku pejabat yang berwenang relatif lebih mudah mensosialisaikan kebijakannya. Dan ketika pimpinan sudah ‘ngomong’ di forum portal biasanya juga bersifat memuaskan para pihak.

Penerapan *e-Government* ini diharapkan mampu mendukung adanya Reformasi Birokrasi. Sebagaimana Informan ke-5 menyatakan bahwa:

“Reformasi Birokrasi diartikan menjadi lebih baik dalam sistem perkantoran, lingkungan kerja, dan sistem penggajian”

Seringkali sebuah keputusan kelompok merupakan hasil dari visi retorik bersama dari anggota-anggotanya. Di mana keyakinan, sikap, nilai, dan persepsi yang dipegang oleh anggota-anggotanya memengaruhi keputusan yang dipilih oleh civitas di ruang siber. Dalam meneliti fantasi organisasi dan civitas Kominfo peneliti melakukan pengelompokan tema-tema yang muncul dalam diskusi forum. Dengan mencampurkan kalimat-kalimat positif dan negatif untuk menarik sebuah kalimat atau tema khusus secara induktif.

Tema fantasi bukan suatu rekaan komunikasi atau angan-angan, melainkan tema yang berkembang di antara anggota (*shared fantasy*) organisasi. Hasil penelitian melihat keterkaitan antar tema-tema yang muncul dalam diskusi kenario yang digunakan untuk menjelaskan kejadian baru dalam bentuk dramatis, campuran forum yang membentuk rantai fantasi (*fantasy chain*). Meskipun pada awalnya berupa kalimat positif dan negatif namun kemudian menjadi sebuah *fantasy type*, yaitu antara negatif dan positif, gabungan antara optimis dan pesimisme.

Sebuah diskusi yang terjalin pada umumnya terdapat pihak yang pro dan kontra sehingga selalu terdapat sisi positif dan negatif. Akan tetapi terdapat pula diskusi yang hanya mempunyai sisi positif atau negatif saja. Analisis isi diskusi dilakukan dengan kategori bahwa kalimat yang positif bertujuan membangun konstruk terhadap keterbukaan informasi, kemajuan organisasi, dan motivasi. Kalimat-kalimat negatif dengan kategori menyerang/ menghujat secara personal, menggunakan huruf kapital dan pesimisme. Contoh kalimat Kalimat positif :

“*Seingat* saya *pas* sosialisasi BKN, filosofinya agar SKP-nya sangat bagus butuh *effort* tambahan seperti tugas tambahan dan kreativitas. Jadi kalau cuma asumsi pekerjaan terkait waktu

dan biaya dipenuhi, hasilnya biasa2 saja (Tunjin tahun depan tetap). Kalau mau naik tunjinknya *ya* harus kerja luar biasa. Bisa dengan efisiensi waktu, efisiensi biaya atau tugas tambahan. Kalau efisiensi waktu dan biaya di atas 50% juga harusnya jadi catatan, artinya pekerjaan itu terlalu mudah buat yang bersangkutan.”

“Untuk Koperasi Kominfo, mari kita selesaikan dengan mekanisme atau rute yang telah ditentukan. Audit akuntan publik dan RAT agar hadir (perwakilan satker) dan dari RAT yang diadakan paling lambat minggu kedua bulan Maret 2014”.

Kalimat negatif :

“Mohon dilakukan LEBIH DARI SATU KALI. Jika ada lebih dari satu mesin, mohon ABSEN DI DUA MESIN BERBEDA.”

“Setuju koperasi dibubarkan. Toh tak ada kontribusi apa-apa. Tapi pengurusnya bikin pertanggungjawaban dulu atas pengelolaan uang yang dipotong tiap bulan dari karyawan.”

Pembentukan Fantasi civitas Kominfo dapat dianalogikan dengan pembentukan opini publik. Opini publik merupakan kumpulan pendapat individu terhadap masalah tertentu yang memengaruhi suatu kelompok orang-orang. Opini publik terbentuk didalam suatu lingkungan komunitas yang luas atau sempit. Karena pengertian publik itu adalah sekelompok individu yang mempunyai kepentingan, perhatian dan minat yang sama pada sesuatu hal. Oleh karena itu pembentukan opini dipengaruhi oleh persepsi individu. Persepsi merupakan suatu proses memberikan makna, yang sebenarnya merupakan akar dari opini. Persepsi ditentukan oleh faktor-faktor seperti: latar belakang budaya, pengalaman masa lalu, nilai-nilai yang dianut dan berita-berita yang berkembang.

Kepala PDSI menuturkan bahwa sekitar 90% lebih civitas Kominfo telah mengakses portal. Sementara untuk unit-unit Kominfo yang di daerah yakni BPPKI dan Balai Monitoring terdapat perbedaan kebijakan. Semua BPPKI di delapan kota besar telah di pasang sistem presensi yang terintegarsi ke Portal Kominfo. Namun untuk Balmon Frekuensi belum dilaksanakan karena Ditjen SDPPI dan Balmon Frekuensi di daerah-daerah telah menerapkan sistem presensi elektronik model telapak tangan (*handkey*). Meskipun tidak berpartisipasi dalam diskusi forum dalam portal Kominfo akan tetapi secara hierarki Balmon-Balmon tersebut bertanggung jawab melaporkan tugasnya melalui Ditjen SDPPI. Dimana SDPPI telah terhubung secara sistem ke Kominfo maka diharapkan ketika ada kebijakan atau sosialisasi peraturan akan lebih cepat tersebar melalui Satker pusat tersebut.

Munculnya tema fantasi organisasi dilacak dari hasil wawancara mendalam di mana informan ke-1 menyatakan bahwa sesuai dengan nama yang digunakan yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika. Maka diharapkan di Kominfo itu menjadi rujukan dalam pengembangan dan penerapan informatika di semua lembaga (*publik dan privat*). Mungkin fantasi tersebut awalnya berupa mimpi. Dalam FGD peserta menyepakati bahwa indikator suksesnya diterapkan *e-office* adalah perkantoran yang benar-benar *paperless* dan berkurangnya belanja kertas. Sebagai proses perjuangan yang sungguh-sungguh dan memerlukan waktu sedikitnya dua tahun. Partisipan bahkan menyatakan secara hiperbolik dengan proses yang berdarah-darah karena tidak cukup hanya kebijakan dan komitmen pimpinan internal namun juga akan memerlukan negosiasi eksternal, integrasi sistem, dan pembelajaran budaya kepada anggota-anggota organisasi. Fantasi “Kominfo *gitu loh*” mempunyai rasa yang bermacam-macam. Apabila seorang yang pesimis dapat menanggapi secara berbeda, bermakna negatif. Apabila seorang yang penuh perhitungan analisa yang kuat berdasarkan

SWOT seperti informan ke-4 menyatakan bahwa kondisi saat ini:

“Saya kira belum dan masih jauh. Sebelum dapat mengatur instansi lain harus dapat membenahi IT di lingkungan internal”.

Informan ke-1 juga menyatakan berpendapat senada bahwa di Kementerian Kominfo masyarakat umum (publik) dapat melihat praktek nyata dari penerapan *e-Government*. Informan ke-1 bahkan menganggap ketika Kominfo tidak menerapkan *e-Government* sebagai sesuatu yang lucu dan aneh. Mungkin seperti analogi yang dikemukakan oleh informan ke-2 sebagai orang yang menyuruh sholat namun dia sendiri tidak sholat. Mewujudkan Kominfo sebagai ledaing sektor IT salah satunya dengan menyatukan sistem *e-office* yang merupakan sistem persuratan dan disposisi untuk manajemen internal Kominfo.

“Nah oleh sebab itu saya bekerja keras, berusaha untuk menerapkan itu. Target saya..saya kemarin sudah rapat beberapa kali dengan *e-Govt* sama Pusat Data, kita harus putuskan satu, harus putuskan satu. Kemudian setelah kita putuskan satu, nanti semua harus ngikutin tapi dimulai dari Sekjen dulu. Saya tidak mau ngajak orang sebelum kita main, itu prinsip saya”.

Peneliti juga menangkap makna komunikasi ketidaksadaran (*unconsciousness*) dalam FGD. Istilah *unconscious* dikembangkan pada abad ke-19, yang bermakna ‘proses yang tidak disadari dan merupakan sumber tindakan yang terjadi dalam berpikir. Komunikasi ketidaksadaran ini dikembangkan oleh Eduard von Hartman, filsuf yang terkenal dengan karya *Philosophy of Unconscious*-nya, menyatakan bahwa realitas manusia terpendam di bawah pengalaman alam bawah sadarnya. Ini yang menjelaskan bahwa di balik kata ada makna; di balik makna ada ide, di belakang ide ada pikiran sadar, dan di belakang pikiran sadar itu ada dunia pikiran bawah sadar. Menurut

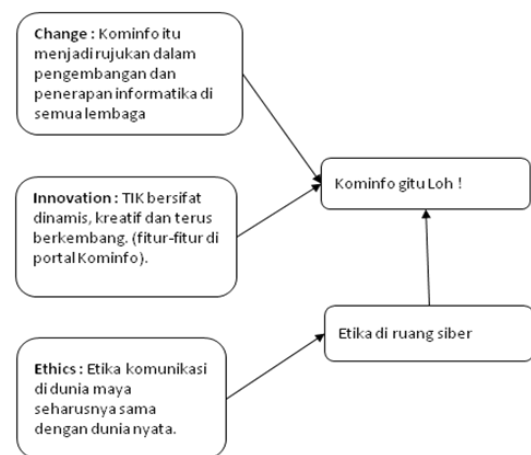
Hartmann, kita perlu bergerak di luar atau melampaui kesadaran untuk menggali di alam bawah sadar yang memungkinkan kesadaran terjadi itu diibaratkan sedang mencari harta karun emas. Ketika salah satu peserta FGD menyatakan kalimat “*Gua sih, pede pede aja ya, Kementerian lain perlu mencontoh kita*”. Maka mayoritas partisipan lainnya menimpali dengan kalimat “*Ciee*”. Di balik kata tersebut terdapat kecemburuan dan harapan. Maka dalam diri kelompok tersebut terdapat motivasi bahwa seharusnya Kominfo menjadi *leading*, percontohan dalam penerapan IT bagi instansi lainnya.

Para peserta FGD menyepakati bahwa indikator suksesnya diterapkan *e-office* adalah perkantoran yang benar-benar *paperless* dan berkurangnya belanja ATK (kertas, tinta dll). Partisipan FGD bahkan menyatakan secara hiperbolik dengan proses yang berdarah-darah karena tidak cukup hanya kebijakan dan komitmen pimpinan internal namun juga akan memerlukan negosiasi eksternal, integrasi sistem, dan pembelajaran budaya kepada anggota-anggota organisasi. Sebuah tema fantasi mempunyai rasa yang bermacam-macam. Apabila seorang yang pesimis dapat menanggapinya secara berbeda, bermakna negatif. Apabila seorang yang penuh perhitungan analisis yang kuat berdasarkan SWOT.

Komunikasi antara civitas Kominfo di ruang siber tersebut terlihat konvergensi lebih dominan. Arah konvergensi tersebut cenderung kepada konvergensi mutual (*mutual convergence*) dimana para pihak yakni informan dan peserta FGD lebih mengarah kepada penyatuan ketimbang pemisahan suatu wacana. Apabila digabungkan dengan hasil observasi di dalam diskusi forum yang merupakan ruang siber Kominfo maka konvergensi yang terjadi bersifat menyeluruh (*complete convergence*) yaitu terjadi penyatuan interaksi komunikasi. Saga organisasional yang dikembangkan cenderung sama menjadi unggul dan percontohan di sektor komunikasi dan informatika.

Tipe Fantasi merupakan sebuah kalimat pendek atau adagium yang relatif mudah diketahui oleh banyak orang. Dari hasil pengolahan data-data yang diperoleh dari observasi, FGD dan interviu maka peneliti menggambarkan kedalam pola-pola tertentu. Pada kesimpulannya terdapat tiga fantasi utama civitas Kominfo yakni:

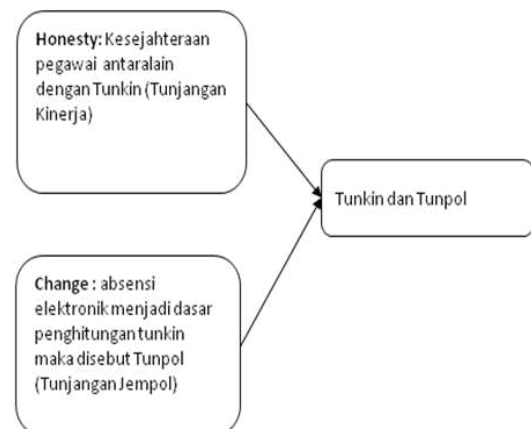
1. Kominfo *gitu loh* !



Gambar 2. Fantasi Pertama

Sesuai dengan namanya Kementerian Kominfo seharusnya menjadi *leading* sektor IT bagi instansi lain. Ditemukan komitmen, persetujuan dan motivasi yang kuat akan tetapi diperoleh juga pemahaman bersama dari civitas Kominfo bahwa proses tersebut masih memerlukan waktu.

2. Tunkin dan tunpol.

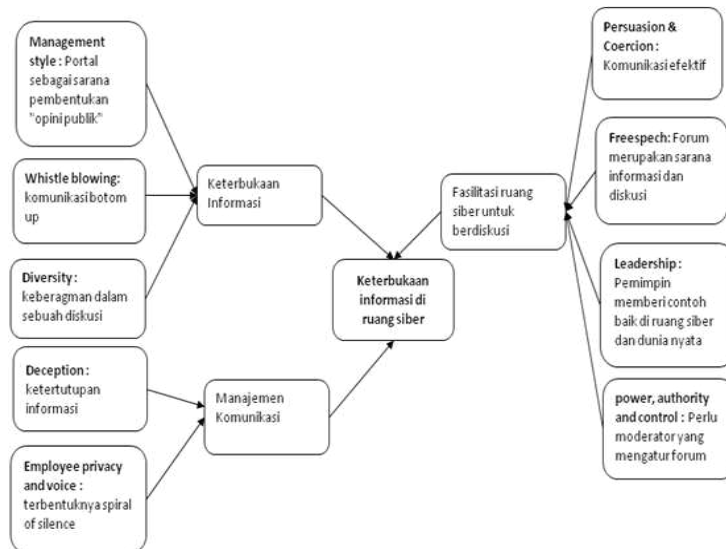


Gambar 3. Fantasi Kedua

Reformasi birokrasi menuntut adanya keteraturan termasuk dalam sistem kehadiran pegawai. Tunjangan kinerja (tunkin) di hitung berdasarkan jumlah kehadiran yang dengan

sistem *e-presensi* menggunakan *finger print* (jempol) sehingga disebut tunjangan jempol.

3. Keterbukaan informasi di ruang siber.

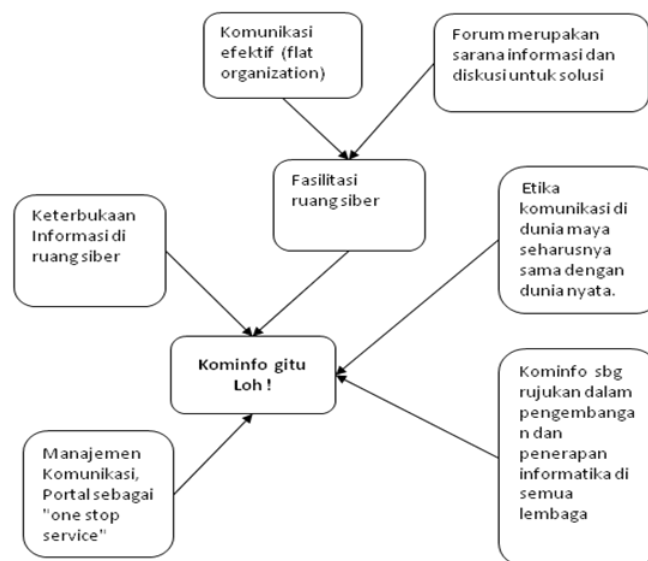


Gambar 4. Fantasi Ketiga

Keterbukaan informasi dan transparansi kebijakan dalam komunikasi ruang siber yang terdapat di portal Kominfo merupakan tema yang utama yang menjiwai dalam setiap diskusi forum.

Dari ketiga fantasi civitas Kominfo kemudian peneliti merumuskan ke dalam

sebuah fantasi organisasi. Fantasi organisasi Kominfo hampir mendekati visi dan misi organisasi Kementerian Komunikasi dan Informatika namun bersifat lebih umum karena merupakan persepsi bersama (*sharing meaning*) dari civitas Kominfo yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 5. Fantasi Organisasi

Dalam proses inilah terjadi akomodasi atas persamaan maupun perbedaan keseluruhan rangkaian proses tersebut pada akhirnya memunculkan pemahaman bersama, menjadi saga organisasional dan dikonsepsikan dalam sebuah tema fantasi atas relasi yang terjadi. Konvergensi maupun divergensi dapat mutual atau nonmutual. Dikatakan mutual bilamana suatu proses komunikasi terdapat komunikasi yang memiliki kesamaan yang mengarah pada pernyataan atau pemisahan. Dan dikatakan nonmutual apabila diantara komunikasi yang satu dan lainnya memiliki perbedaan arah. Konvergensi dapat terjadi sebagian atau seluruhnya (*partial or complete convergence*). Berpijak pada konsep tersebut maka konvergensi yang terjadi dalam diskusi forum yakni komunikasi di ruang siber civitas kominfo merupakan konvergensi keseluruhan. Konvergensi keseluruhan tersebut dibuktikan dengan pembentukan tema fantasi yang sama bahwa secara organisasional Kominfo merupakan gambaran telekomunikasi di Indonesia dan civitas Kominfo seharusnya mampu berkomunikasi dengan baik secara metode, tata cara, teknologi dan etika. Tema fantasi yang terbentuk : “Kominfo gitu loh!”.

Konvergensi simbolis merupakan teori umum yang dibangun dari gabungan penelitian sosial dan tradisi komunikasi retorika. Salah satu keunggulan dari penelitian yang menggunakan teori konvergensi simbolik yakni cenderung membangun sebuah teori, mengklarifikasi sebuah konsep atau minimal membuat kesimpulan sebagai ‘sebuah jalan’ untuk penelitian selanjutnya. Penelitian telah menjelaskan konsep-konsep utama antara lain dramatisasi pesan atau komentar (*dramatizing message*), rantai fantasi (*fantasy chaining*), jenis fantasi (*fantasy type*), dan visi retorikal (*rhetorical vision*). Konsep-konsep tersebut saling berkaitan dan membentuk fantasi bersama (*shared fantasy*) organisasi.

Analisis tema fantasi sekali lagi membuktikan keampuhannya, dapat digunakan dalam konteks organisasi formil skala besar. Konvergensi simbolis dalam hal ini terjadi dalam komunikasi di ruang siber yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Penelitian ini juga membuktikan bahwa komunikasi yang terjadi di ruang siber mempunyai dampak yang signifikan terhadap perubahan iklim komunikasi di ruang riil. Perubahan sikap dan pola-pola komunikasi dalam organisasi resmi dan proses pembentukan kebijakan menjadi lebih terbuka dan transparan. Penggunaan analisa tema fantasi harus mampu juga menjelaskan dari pokok utama teori konvergensi simbolik. Proses terbentuknya konvergensi simbolik dapat di lihat sebagai bagan umum (generik) yang berlaku di organisasi publik dan privat.

Kesadaran bersama (*common consciousness*) dibangun melalui cerita-cerita dan ritual kelompok yang memberikan makna tersendiri bagi para anggotanya (Bormann, Cragan, and Shield 1994; Jackson 1998). Lebih lanjut Borman dalam Duffy (2008) menyatakan bahwa kekuatan fantasi (*power of the fantasy*) tersebut mempunyai kemampuan untuk membangun, memicu evolusi, dan menguraikan drama yang melingkupi para anggotanya dan kemudian mengubah perilaku mereka.

Ketika sebuah organisasi membuka kran komunikasi ruang siber maka penelitian ini menunjukkan bahwa efek yang sama dapat terjadi. Elemen kunci dari pembentukan pemahaman dan kesadaran bersama (*shared group consciousness*). Fantasi organisasi yang terbentuk akan sangat mendukung pada daur hidup (*life-cycle*) organisasi tersebut selanjutnya. Elemen kunci dari visi retorik organisasi yang menerapkan komunikasi ruang siber dapat dijelaskan dalam bagan sebagaimana berikut:

Tabel 3. Elemen Kunci Komunikasi Ruang Siber Portal Kementerian Kominfo

No.	Terminologi Fantasi	Komunikasi Ruang Siber
1.	<i>Rhetorical vision</i>	Transparansi Informasi
2.	<i>Setting theme, Scene</i>	Portal, Ruang siber
3.	<i>Character theme</i>	Pimpinan yang berkomitmen.
4.	<i>Actions theme</i>	Reformasi Birokrasi
5.	<i>Symbolic cue</i>	flat communication.
6.	<i>Sanctioning agent</i>	e-Government (sistem perkantoran elektronik)
7.	<i>Rhetorical community, Dramatise personae.</i>	Civitas (anggota organisasi)
8.	<i>Master analogue</i>	Demokrasi

Penelitian menemukan beberapa gagasan positif yang penting untuk pengembangan konvergensi simbolis dalam komunikasi di ruang siber. Partisipan FGD menyampaikan ide tentang akumulasi pendapat umum yang mirip dengan pembentukan opini publik. Apabila sebuah diskusi forum mempunyai ukuran atau parameter yang disepakati bersama. Sistem *flag* sebagai parameter penting dan tidaknya sebuah isu / permasalahan yang dilontarkan di portal Kominfo. Mungkin dalam fitur ditampilkan semacam tombol “like” di *facebook*. Jadi pegawai yang tidak berkomentar bisa “like” atau “unlike”. Fungsi pertama sebagai parameter (indikator) apakah tema dalam diskusi forum tersebut perlu ditindaklanjuti atau hanya semata obrolan biasa.

Dengan adanya akumulasi pendapat maka akan memecah kebisuan masif dan mengidentifikasi komunikasi latent yang mungkin tersembunyi seperti bongkahan es (*iceberg*). Teori *spiral of silence* yang dikemukakan oleh Elizabeth Neuman (1974).

Teori yang menggambarkan bahwa pernyataan atau pendapat pribadi bergantung pada apa yang dipikirkan atau diharapkan orang lain, atau apa yang orang rasakan atau anggap sebagai pendapat dari orang lain. Kebisuan masif ini terjadi karena pada umumnya orang berusaha untuk menghindari isolasi sosial, atau pengucilan dalam komunitasnya dalam kaitannya mempertahankan sikap atau keyakinan tertentu. Sebuah permasalahan dalam forum dapat dikategorikan seperti sebuah nota dinas sebagai biasa, penting, dan sangat penting atau segera berdasarkan jenis dan jumlah *flag* atau *like* yang diperolehnya. Secara psikologis meng-klik sebuah tombol juga relatif lebih mudah daripada menulis sebuah komentar kemudian mempostingnya. Dengan adanya sistem *flag* atau *like* ini maka admin dalam diskusi ruang siber tersebut mampu menyeleksi, mengeskalasi, dan meneruskan, sesuatu hal yang penting kepada pejabat yang berwenang secara lebih objektif.

Alternatif lainnya adalah dengan menunjuk seorang moderator yang khusus bertugas menangani forum diskusi di ruang siber tersebut. Moderator sebagai orang yang resmi ditunjuk bekerja berdasarkan peraturan yang disepakati bersama oleh para anggota forum tersebut. Peran seorang moderator dapat dikerjakan oleh satu orang atau tim namun hal yang patut diwaspadai adalah jangan sampai menjadi timbul perasaan diawasi, dipantau aktivitasnya. Persepsi pengawasan yang berlebihan akan menciptakan iklim komunikasi organisasi yang kurang sehat. Iklim komunikasi yang mendominasi dapat menjadi seperti panoptikon.

PENUTUP

Dengan komunikasi ruang siber, organisasi menjadi lebih setara (*flat*) dan mengurangi sekat-sekat struktural. Tema Fantasi yang terbentuk dari proses konvergensi simbolik komunikasi ruang siber tersebut dapat

digunakan baik di organisasi publik maupun privat. Penelitian menemukan bahwa dalam berkomunikasi di ruang siber manusia tetap berpikir multidimensi tidak linear. Perilaku pimpinan di dunia maya diharapkan sama dengan di dunia nyata. Ketiga bahwa, sistem presensi elektronik memengaruhi performa kinerja sebagai dasar penghitungan tunjangan kinerja (tunjin). Dengan penggunaan *e-office* maka merubah ritme kerja, dimana pekerjaan menjadi tidak terbatas oleh jam kerja. Sementara efek samping fasilitasi ruang siber, menimbulkan euforia kebebasan menyatakan pendapat terutama dalam diskusi bebas. Isu etika komunikasi di ruang siber (*cyber ethics*) justru menguat dan kembali diperbincangkan.

Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik sebuah perusahaan atau organisasi yang menggunakan jaringan komunikasi intranet harus menerapkan menerapkan 3(tiga) hal yaitu etika, moral, dan hukum dalam komunikasi ruang siber. Kebijakan-kebijakan yang dibuat supaya mampu mempengaruhi individu, membuat etika terinternalisasi di dalam diri individu dalam perusahaan tersebut. Atau sebaliknya kebijakan etika ini bisa juga terbentuk dari kondisi lingkungan sekitarnya. Yakni nilai-nilai dan norma yang diyakini oleh civitasnya. Sehingga organisasi berusaha menciptakan kebijakan dengan menyesuaikan kondisi sekitarnya (*existing condition*).

Adapun keterbatasan penelitian ini, belum dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang tema-tema fantasi di dalam organisasi Kementerian Kominfo. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu penelitian sehingga tidak dapat dilakukan pendekatan atau studi *etnometodologi* yang bersifat jangka panjang (*longterm*) dan mampu mengungkap kultur dan budaya organisasi. Studi etnometodologi diakui merupakan pendekatan ideal dan komprehensif terhadap penelitian tentang iklim dan budaya komunikasi organisasi. Kedua disarankan untuk penelitian selanjutnya tentang keterbukaan informasi di ruang siber maka perlu dilakukan dengan

paradigma kritis. Karena terdapat hal-hal yang tidak dapat dijelaskan apabila menggunakan prespektif konstruktivis interpretif.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas. (1967). *the social construction of reality: a treatise i the sociology of knowledge*. England: Penguin Books Ltd.
- Blau, Peter M, (1987), *Birokrasi dalam masyarakat modern*. Jakarta: Universitas Indonesia(UI-Press).
- Castells, Manuel (2010), *The rise of network society*, United Kingdom: Willey-Blackwell Publishing, Ltd.
- Creswell John, W (2009), *Research design, qualitative, quantitative, and mixed method approaches*, Sage Publication, Thousand Oaks California.
- Daniels, Tom D, Barry K. Spiker and Michael Papa (1997), *Prespektif on organizational communication*, Chapter 10. 4th ed, Boston, MA: McGraw-Hill Co.
- Denzin , Norman K, Yvonna S. Lincoln (2009), *Handbook of qualitative research*, Pustaka pelajar
- Ernest G. Bormann (1982), A fantasy theme analysis of the television coverage of the hostage release and the reagan inaugural, pages 133-145 Quarterly Journal of Speech Volume 68.
- Ernest G. Bormann, John F. Cragan, Donald C. Shields, (2001), *three decades of developing, grounding, and using Symbolic Convergence Theory (SCT) in William B.Gudykunst*, Communication Yearbook 25 P.271-313.
- Ernest G. Bormann, Roxsan L Kuntsonn, And Karen Musolf, (1997), *why do people share fantasies? an empirical investigation of a basic tenet of the symbolic convergence communication theory, communication studies*, Vol. 48, fall 1997, Proquest Research Library P.254

- Griffin EM, (2003), *A first look at communication theory, 5ed, McGraw Hill.*
- Goldhaber, Gerald M. (1993). *Organizational Communication. Sixth edition.* McGraw Hill.
- Hopkins Lee (2011), *Symbolic Convergence Theory*, <http://www.leehopkins.com/secondlife/2011/05/31/symbolic-convergence-theory/>
- John F. Cragan & Shields, Donald C. (1992), The use of symbolic convergence theory in corporate strategic planning: A case study *pages 199-218, Journal of Applied Communication Research Volume 20.*
- Kartikawangi, Dorien. (2013). *Tema fantasi strategi komunikasi bisnis perusahaan multinasional.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Leena, Saarinen. (2002), *Imagined community and death digital creativity, Volume 13, Issue 1, Routledge, P. 53-61*
- Margaret E. Duffy. (2003). Web of Hate: a Fantasy Theme Analysis of the Rhetorical Vision of Hate Groups Online, *Journal of Communication Inquiry* Vol. 27 pages 291, Sage publications.
- Thoha, Miftah. (2005). *Birokrasi dan politik di Indonesia.* cet Kesatu. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Thoha., Miftah. (2011). *Birokrasi pemerintah Indonesia di era reformasi,* cet Ketiga Jakarta: Kencana Media Group..
- Profil dan statistik Kementerian Komunikasi dan Informatika <http://www.kominfo.go.id>
- Geoffrey Liu dalam jurnal Computer-Mediated Communication <http://www.ascusc.org/jcmc>.
- Open Government Indonesia, <http://opengovindonesia.org>.
- Grand Design Reformasi Birokrasi, [www.menpan.](http://www.menpan.go.id)